

REFERENSI

- Cohen, L, Manion, L & Morrison, K 2007, *Research Methods in Education*, 6th edn, Companion @ website, New York: Routledge.
- Creswell, J, W 2010, *Terjemahan: Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Evans, T, G 2003, *Accounting Theory: Contemporary Accounting Issues*, Thomson-South Western, Australia.
- Gudono 2012, *Teori Organisasi*, BPFE, Yogyakarta.
- Harahap, S, S 2007, *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Haryadi, E, S, Kamaliah & Ratnawati, V 2015, 'Analisis Pengungkapan (Disclosure) Laporan Keuangan Kabupaten yang Meraih Opini Audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dua Tahun Berturut-Turut', *Jurnal Akuntansi*, vol. 3, no. 2, hh. 184–195.
- Hennink, M, Hutter, I & Bailey, A 2011, *Qualitative Research Methods*, Sage Publications Ltd, London.
- Herawaty, M & Hoque, Z 2007, 'Disclosure In The Annual Reports of Australian Government Departments', *Journal of Accounting and Organizational Change*, Emerald Group Publishing Limited, vol. 3, no. 2, hh. 147–168.
- Hilmi, A, Z & Martani, D 2012, 'Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi', *Jurnal ASPAK, Universitas Indonesia, Jakarta*, SNA 15 Banjarmasin, no. 17.
- IGI-Province Pervormance, dilihat 30 Maret 2016, <http://kemitraan.or.id/igi/index.php/province-performance>.
- Ikatan Akuntan Indonesia 2012, *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Iqbal, M 2016, 'Apakah Kecukupan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dipertimbangkan dalam Formulasi Opini BPK?',

Thesis, Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Jogiyanto 2004, *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*, BPF, Yogyakarta.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Rapor Akuntabilitas Kinerja K/L dan Provinsi Meningkatkan, dilihat 30 Maret 2016, <http://www.menpan.go.id/berita-terkini/4170-rapor-akuntabilitas-kinerja-k-l-dan-provinsi-meningkat>.

Mardiasmo 2006, 'Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik', *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, vol. 2, no. 1, hh. 1–17.

Mardiasmo 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta.

Marjulin 2012, 'Analisa Pengungkapan Laporan Keuangan Kota Banda Aceh Dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian', *Jurnal Akuntansi*, vol. 1, no. 1, hh. 67–82.

Martani, D & Lestiani, A 2012, 'Disclosure in Local Government Financial Statements: The Case of Indonesia', *Global Review of Accounting and Finance*, vol. 3, no. 1, hh. 67–84.

Moleong & Lexy, J 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.

Muzahid, M 2014, 'Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, dan Lama Pengalaman Kerja Pegawai Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD di Kabupaten Aceh Utara', *Jurnal Akuntansi*, vol. 2, no. 2.

Rencana Strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jambi 2014-2019, dilihat 26 Maret 2016, <http://jambiprov.go.id/images/renstra/RENSTRA%20BPKAD%20.pdf>.

Republik Indonesia 2016, Badan Pemeriksa Keuangan, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS), dilihat 26 Maret 2016, <http://www.bpk.go.id/ihps>.

Republik Indonesia 2004, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

- Republik Indonesia 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Republik Indonesia 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Republik Indonesia 2004, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia 2007, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
- Republik Indonesia 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia 2012, Buletin Teknis (Bultek) Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Nomor 01 tentang Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah.
- Ritonga, I, T 2010, *Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Lembaga Kajian Manajemen Pemerintahan Daerah (LKMPD), Sleman, Yogyakarta.
- Ryan, C, Stanley, T & Nelson, M 2002, 'Accountability Disclosures by Queensland Local Government Councils: 1997-1999', *Journal Financial Accountability & Management*, Blackwell Publisher, vol. 18, no. 3, hh. 261-289.
- Sebrina, N 2009, 'Pengaruh Politik, Insentif Pengawasan, dan Insentif Manajemen Terhadap Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Daerah Sumbar, Riau, dan Jambi)', Thesis, Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sugiyono 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono 2013, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 16th edn, Alfabeta, Bandung.
- Suhardjanto, D & Lesmana, S, I 2010, 'Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib di Indonesia', *Jurnal Prestasi STIE BANK BPD JATENG*, vol. 6, no. 2.

Susbiyani, A, Subroto, B, Sutrisno & Purnomosidhi, B 2014, 'The Compliance with Mandatory Disclosure of Financial Statement: A Study from Local Government in Indonesia', *Research Journal of Finance and Accounting*, vol. 5, no. 10.

Suwardjono 2014, *Teori Akuntansi 'Perekayasaan Pelaporan Keuangan'*, Ketiga, BPFE, Yogyakarta.

Yin, R, K 2014, *Case Study Research Design and Methods*, 5th edn, Sage Publications Asia-Pacific Pte. Ltd, United States of America.